

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Anita Lestari
Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Halu Oleo, Kendari
Email :

Nasrullah Dali
Universitas Halu Oleo, Kendari

Muntu Abdullah
Universitas Halu Oleo, Kendari

-Abstaract

The aim of this study was to determine: 1) the effect of DAU on capital expenses; 2) the effect of PAD on capital axpenses; 3) the effect of DAU on the independence of local finance, 4) the effect of PAD on the independence of local finance. 5) the effect of Capital Expenses on the independence of local finance. Data were collected by conducting a survey and were examined with the multiple linear regression analysis using the SPSS program.

Results of the study showed that the value ratio of the local financial independence of Southeast Sulawesi in the period from 2003 to 2015 was still categorized as low. Result of partial regression analysis indicated that for the first equation only DAU had positive and significant effect on capital expenses, whereas for the second equation both PAD and capital expenses variables had positive and significant effect on the local financial independence. Simultaneously, the first equation showed that DAU and PAD had positive and significant effect on capital expenses, and so was the second equation, which showed that DAU, PAD, and capital expenses had positive and significant effect on the local financial independence. The study recommended that the local government continues its effort to reduce its big reliance on DAU (general allocation budget).

Keywords: General Allocation Budget, Local Revenue, Capital Expenses, Local Financial Independence.

1. PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dalam suatu wilayah. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka wilayah tersebut dapat dikatakan mandiri. PAD itu sendiri merupakan komponen utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD. Jika struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan

daerah tersebut telah memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Sementara Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta berbagai bentuk transfer lainnya dari Pemerintah Pusat semestinya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung penuh oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, yaitu daerah diberikan otonomi atau kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Menurut Dumairy (2009) menyatakan bahwa dalam hal tingkat pendapatannya, terdapat perbedaan yang cukup mencolok di antara wilayah – wilayah di tanah air dan selama ini berlangsung ketidakmerataan aktifitas ekonomi atau kegiatan pembangunan antar wilayah. Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal yakni semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal akan semakin tinggi. Selanjutnya Ardhani (2011) mengatakan bahwa bahwa PAD semakin tinggi PAD maka semakin tinggi realisasi anggaran belanja modal daerah.

Propinsi Sulawesi Tenggara dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD, sehingga selama ini yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan PAD dalam membiayai belanja daerah terutama pada porsi belanja pegawai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setiap tahunnya selama priode 2006 sampai 2015. Pada tahun 2006 jumlah PAD sebesar Rp. 120 miliar dan kemudian mencapai Rp. 514 miliar di tahun 2013. Pada Tahun 2006, PAD di provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 120 miliar dan kemudian mencapai Rp. 514 miliar di tahun 2013. Demikian pula dengan Dana alokasi umum (DAU) Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun selama priode yang sama. Pada tahun 2006, DAU Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 477 miliar dan kemudian mencapai hingga Rp. 981 Miliar di tahun 2013. Rina ariani (2010) dalam penelitiannya menemukan peningkatan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2002) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Pendapatan atau penerimaan daerah diatur menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Sumber Penerimaan Daerah sampai dengan Pasal 48 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Sidik dkk (2002) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan Negara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Dalam Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 disebutkan bahwa belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Menurut Halim (2007), “Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Penelitian Ardhani (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Penelitian Wandira (2013) menemukan bahwa DAU berpengaruh dengan arah negatif terhadap belanja modal. Hasil penelitian Eryad (2011) dan Muliana (2009) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian Ramadhani (2015) menunjukkan bahwa: belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1 (terlampir). Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal
- H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
- H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H₄: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H₅: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipakai adalah seluruh data DAU, PAD dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan karakteristiknya yang dipakai sebagai sampel adalah Laporan Realisasi APBD yang berisi DAU, PAD dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2003 – 2015.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian adalah data sekunder yang meliputi Data Laporan Realisasi APBD tahun 2003 – 2015, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara dimana dari dokumen ini diperoleh data mengenai jumlah Realisasi Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen, bukti, catatan atau bahan – bahan laporan historis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. satu tujuan Negara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Dalam Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 disebutkan bahwa belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Menurut Halim (2007), “Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Penelitian Ardhani (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Penelitian Wandira (2013) menemukan bahwa bahwa DAU berpengaruh dengan arah negatif terhadap belanja modal. Hasil penelitian Eryad (2011) dan Muliana (2009) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian Ramadhani (2015) menunjukkan bahwa: belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1 (terlampir). Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi seberapa kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Dalam perhitungannya digunakan jasa komputer berupa software dengan program SPSS for window. Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

Y₁ = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep
 X_1 = Dana Alokasi Umum (DAU)
 X_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
e = error

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Y_1 + e \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

Y_2 = Kemandirian Keuangan Daerah
 α = Konstanta
 β = Slope atau koefisien regresi atau intersep
 X_1 = Dana Alokasi Umum (DAU)
 X_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Y_1 = Belanja Modal
e = error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Analisis Regresi

Dari hasil analisis persamaan 1 pada program SPSS, maka diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam tabel 1 (terlampir). Berdasarkan hasil analisis regresi persamaan 1 pada tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -34,521 + 0,549DAU - 0,117PAD$$

Berdasarkan persamaan 1 dari regresi linear berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Nilai konstanta (a) yaitu sebesar -34,521, hal ini menunjukkan bahwa jika variabel PAD dan DAU memiliki nilai yang tetap, maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 34,521.
- b. Koefisien regresi untuk variabel DAU adalah 0,549. Seperti halnya PAD, sebaliknya nilai positif mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara DAU terhadap belanja modal. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel bebas DAU terjadi kenaikan satu satuan dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka variabel terikat belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,549.
- c. Koefisien regresi untuk variabel PAD adalah -0,117 yang dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara PAD terhadap belanja modal. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel PAD terjadi kenaikan satu satuan dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka variabel terikat belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 0,117 satuan.

Berdasarkan hasil analisis regresi persamaan 2 pada tabel 2 (terlampir), maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 38,762 - 0,069DAU + 0,122PAD + 0,005Belanja\ Modal$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a) yaitu sebesar 38,762, hal ini menunjukkan bahwa jika variabel PAD, DAU dan belanja modal memiliki nilai yang tetap, maka kemandirian keuangan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 38,762.
- b. Koefisien regresi untuk variabel DAU adalah -0,069. Seperti halnya PAD, sebaliknya nilai negatif mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara DAU terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel bebas DAU terjadi kenaikan satu satuan dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka variabel terikat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,069.
- c. Koefisien regresi untuk variabel PAD adalah 0,122 yang dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel PAD terjadi kenaikan satu satuan dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka variabel terikat kemandirian keuangan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,122 satuan.
- d. Koefisien regresi untuk variabel belanja modal adalah 0,005 yang dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel belanja modal terjadi kenaikan satu satuan dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka variabel terikat kemandirian keuangan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,005 satuan.

Untuk membuktikan model persamaan 1 dan 2 maka digunakan uji korelasi *product moment* untuk pengujian secara parsial dan uji korelasi ganda untuk pengujian secara simultan atau bersama-sama.

Pada persamaan 1 berdasarkan tabel 1 (terlampir) diketahui bahwa nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2,776. Berikut ini besarnya nilai t_{hitung} dan probabilitasnya untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel Dana Alokasi Umum (X_1). Pada tabel 1, variabel bebas X_1 nilai t_{hitung} sebesar 1,921 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047 hal ini berarti nilainya lebih besar dari probabilitas yang ditetapkan yaitu 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel bebas X_1 pada tingkat signifikansi 0,05 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2). Pada tabel 1, variabel bebas X_2 nilai t_{hitung} sebesar -0,290 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,778 hal ini berarti nilainya lebih besar dari probabilitas yang ditetapkan yaitu 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel bebas X_2 pada tingkat signifikansi 0,05 secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Untuk persamaan 2 berdasarkan pada tabel 2 (terlampir) diketahui bahwa nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2,776. Berikut ini besarnya nilai t_{hitung} dan probabilitasnya untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel Dana Alokasi Umum (X_1). Pada tabel 2, variabel bebas X_1 nilai t_{hitung} sebesar -4,757 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 hal ini berarti nilainya lebih kecil dari probabilitas yang ditetapkan yaitu 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel bebas X_1 pada tingkat signifikansi 0,05 secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2). Pada tabel 2, variabel bebas X_2 nilai t_{hitung} sebesar 7,054 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti nilainya lebih kecil dari probabilitas yang ditetapkan yaitu 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel bebas X_2 pada tingkat signifikansi 0,05 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Variabel Belanja Modal (Y_1), Pada tabel 2, variabel bebas Y_1 nilai t_{hitung} sebesar 0,366 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,724 hal ini berarti nilainya lebih besar dari probabilitas yang ditetapkan yaitu 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel bebas Y_1 pada tingkat signifikansi 0,05 secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

b. Pembahasan

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Artinya besar kecilnya DAU akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap besar kecilnya belanja modal sehingga semakin tinggi DAU maka akan semakin tinggi belanja modal. Sebaliknya, semakin rendah DAU yang diperoleh maka akan semakin rendah pula belanja modal yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhan Nuarisa (2013) bahwa DAU mempunyai hubungan yang positif dengan pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian sejalan dengan *fiscal federalism theory* serta Abdullah dan Halim (2004) yang menyatakan peningkatan DAU akan mendorong belanja modal. Musgrave dalam teori *fiscal federalism* mengungkapkan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengelolaan revenue dan expenditure antar pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menemukan bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dengan arah negatif. Artinya PAD tidak memiliki peran yang penting dalam realisasi anggaran belanja modal daerah di provinsi Sulawesi tenggara. Selain itu meskipun terjadi peningkatan dari PAD maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah penurunan belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung kajian empiris yang dilakukan oleh Yovita (2011) yaitu PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Salah satu faktor yang menyebabkan PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi tenggara adalah jumlah realisasi PAD yang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah realisasi DAU selama kurun waktu periode 2003 sampai 2015.

Hasil analisis statistik menunjukkan DAU berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan arah negatif. Artinya apabila DAU mengalami peningkatan akan menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan. Sebaliknya apabila DAU mengalami penurunan justru akan menyebabkan rasio presentase kemandirian keuangan daerah provinsi Sulawesi tenggara meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyana (2009) yang mengungkapkan bahwa DAU memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah

dengan arah negatif. Faktor yang menyebabkan peran DAU justru memberikan penurunan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di propinsi Sulawesi tenggara yaitu disatu sisi tingginya alokasi DAU setiap tahunnya sedangkan disisi lain berdasarkan nilai rasio menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah sangat rendah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Adapun makna dari temuan tersebut adalah PAD memiliki peran yang penting didalam mengukur tingkat kemandiran keuangan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD maka akan semakin meningkatkan presentase rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi tenggara dan sebaliknya apabila PAD mengalami penurunan dapat menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Marizka (2013) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Alasan yang bisa menjelaskan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi tenggara yaitu bila dilihat berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah memang masih tergolong rendah. Demikian juga dengan nilai PAD provinsi Sulawesi tenggara yang jauh lebih kecil dibanding salah satu dana transfer pusat yakni DAU.

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa besar kecilnya anggaran belanja modal tidak memiliki peran yang penting dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio presentase. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lusiana (2013) yang menyatakan bahwa hasil data dan pengujian hipotesis belanja modal mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah, yang apabila dibandingkan dengan investasi swasta mempunyai nilai yang relatif kecil, namun belanja modal tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Rina ariani (2010) menyatakan hal yang berbeda dimana penelitiannya membuktikan adanya pengaruh signifikan positif dari belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya makin besar Dana Alokasi Umum maka akan semakin meningkatkan Belanja Modal dan sebaliknya.
2. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini

- menunjukkan Pendapatan Asli Daerah belum memiliki peran penting dalam alokasi belanja modal daerah.
3. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya makin besar Dana Alokasi Umum maka akan semakin rendah tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
 4. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
 5. Belanja modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Besar kecilnya perubahan yang terjadi pada belanja modal tidak memiliki peran dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

6. REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali", Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya, hal. 1140.
- Ardhani, Pungky. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ardhian Nuarisa, Sheila. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". Skripsi. FE Akuntansi Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007 Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26-27 Juli 2007.
- Dumairy. 2009. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ersyad, Muhammad. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)*. Skripsi. FE UNP: Padang.
- Halim, Abdul 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat*, Jakarta.

....., 2007. Akuntansi Sektor Publik,
No 1. Universitas Negeri Semarang.

Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

Lusiana Darsono, Ika. 2013. "Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah". Jurnal Profita Vol. 1, No. 8. Yogyakarta: UNY.

Marizka, Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006 - 2011). Artikel Ilmiah. FEKON Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Ramadhani Darwis, Erstelita Tria 2015. "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat", Artikel Ilmiah, Prodi Akuntansi FE UNP, Padang.

Rina Ariani, Kurnia. 2010. "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)", Skripsi, FE USMS, Surakarta.

Sekaran, Uma. 1992. "Research Methods for Business". Third Edition. Southern Illionis University. Terjemahan.

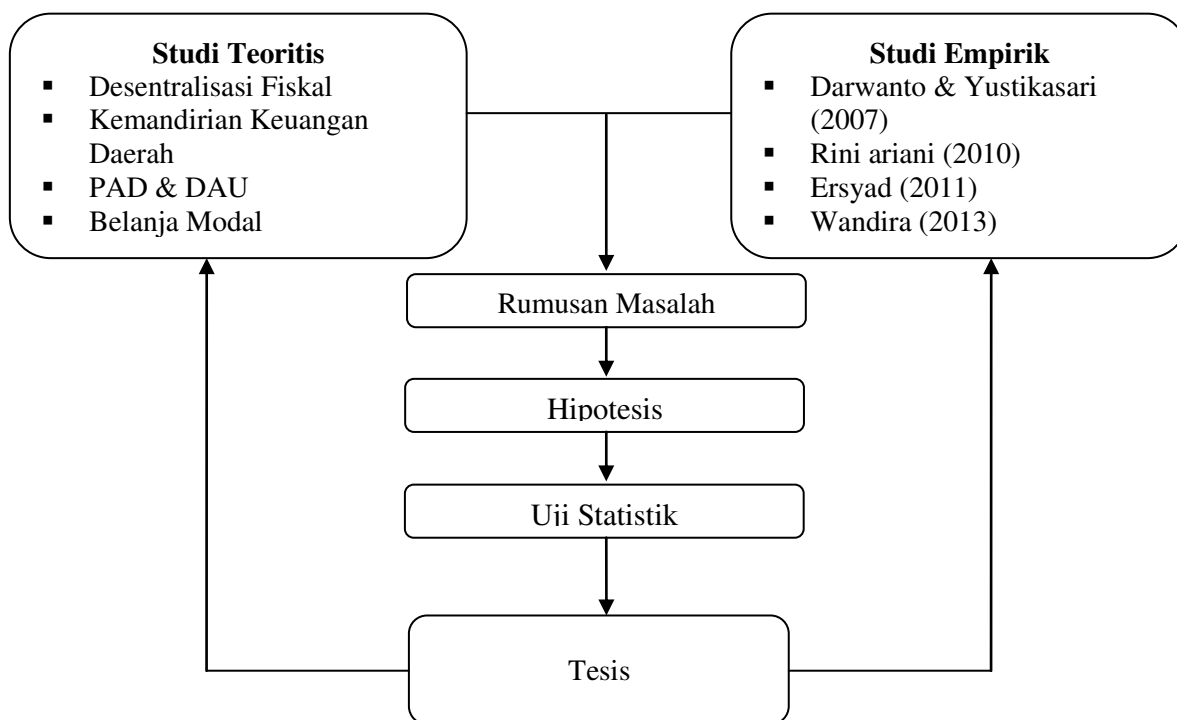
Sidik, Machfud dkk. 2002. Dana Alokasi Umum - Konsep Hambatan, dan prospek di Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. "Pengaruh Pad, Dau, Dak, dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal", Accounting analysis Journal, Vol. 2,

Yovita, Farah Marta. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)". Diponegoro Jurnal Of Accounting.

LAMPIRAN

Gambar 1 Skema Kerangka Pikir Penelitian



Tabel 1. Ringkasan Analisis Regresi Pengaruh PAD dan DAU
 Terhadap Belanja Modal Provinsi Sulawesi Tenggara

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constand)	-34,521	83,592	-0,413	0,689				
X ₁ (DAU)	0,549	0,286	1,921	0,047	-0,539	0,338	0,117	8,566
X ₂ (PAD)	-0,117	0,403	-0,290	0,778	-0,98	-0,051	0,117	8,566
R ²	0,722							
F _{hitung}	11,678							
F _{tabel}	6,944							
t _{tabel}	2,776							
D-W	2,00							

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Output SPSS, data diolah 2015 (Lampiran)

Tabel 2 Ringkasan Analisis Regresi Pengaruh PAD, DAU dan Belanja Modal
 Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constand)	38,762	3,613	10,729	0,000				
X ₁ (DAU)	-0,069	0,015	-4,757	0,001	-0,860	0,567	0,083	12,079
X ₂ (PAD)	0,122	0,017	7,054	0,000	0,928	0,840	0,116	8,646
Y ₁ (Belanja Modal)	0,005	0,014	0,366	0,724	0,128	-0,044	0,278	3,595
R ²	0,886							
F _{hitung}	20,817							
F _{tabel}	6,944							
t _{tabel}	2,776							
D-W	1,348							

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Output SPSS, data diolah 2015 (Lampiran)